

**FLYPAPER EFFECT PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (2009 - 2013)**WIA RIZQI AMALIA ([wiarizqi.amalia@gmail.com](mailto:wiarizqi.amalia@gmail.com))

WAHYUDIN NOR

M. NORDIANSYAH

Universitas Lambung Mangkurat

---

**A B S T R A C T**

---

*This study was aimed to demonstrate the effect of local revenue (PAD), general allocation fund (DAU), and special allocation fund (DAK) to the local government expenditure, and also demonstrate empirically whether the effect of the DAU and DAK to the local government expenditure are larger than the effect of PAD to the local government expenditure in the district/city of South Kalimantan Province in 2009–2013 period. Data analysis method used in this research is descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis using the SPSS (Statistics Product and Service Solutions) version 17. Before performing data analysis, first tested the classical assumption of normality test, multicollinearity, autocorrelation, and heteroscedasticity test. The results showed that: (1) the PAD does not affect the local government expenditure, (2) the DAU affect the local government expenditure, (3) the DAK affect the local government expenditure, and (4) the coefficient of the DAU and the DAK is greater than the value of the coefficient of PAD, and both significantly influence the local government expenditure. This indicates that there has been a flypaper effect on local government expenditure in the districts / cities at South Kalimantan Province in 2009–2013 periods.*

**Keywords :** *Local Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Local Government Expenditure, Flypaper Effect*

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) untuk pengeluaran pemerintah daerah, dan juga membuktikan secara empiris apakah efek dari DAU dan DAK ke daerah belanja pemerintah lebih besar dari pengaruh PAD terhadap belanja pemerintah daerah di kabupaten / kota Provinsi Kalimantan Selatan pada periode 2009-2013. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear menggunakan SPSS (Statistik Produk dan Layanan Solusi) versi 17. Sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) PAD tidak mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah, (2) DAU mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah, (3) DAK mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah, dan (4) koefisien DAU dan DAK lebih besar dari nilai koefisien PAD, dan keduanya secara signifikan mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi flypaper effect pengeluaran pemerintah daerah di kabupaten / kota di Provinsi Kalimantan Selatan di 2009-2013 periode.

**Kata kunci:** *Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pengeluaran Pemerintah Daerah, Efek Flypaper*

---

**PENDAHULUAN**

Penerapan Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1999 yang telah disempurnakan oleh UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengawali era desentralisasi di bidang fiskal. Menurut

UU No.33 Tahun 2004 sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan atau dana transfer terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan

Dana Bagi Hasil (DBH). Seluruh sumber pendanaan ini memiliki kontribusi masing-masing bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengeluaran belanja.

Diberlakukannya desentralisasi fiskal membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggali dan mengoptimalkan penerimaan PAD sesuai potensi daerah yang dimiliki karena semakin tinggi PAD, semakin banyak kebutuhan yang dapat dibiayai oleh PAD. Namun, pada kenyataannya jumlah penerimaan PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih relatif kecil. Pada akhirnya, kekurangan dana anggaran ditutup oleh pemerintah pusat dalam bentuk dana transfer (Adisasmita 2011).

Besarnya kebutuhan belanja daerah yang juga semakin meningkat tidak memungkinkan beberapa pemerintah provinsi atau kabupaten/kota untuk hanya mengandalkan PAD semata. Pada akhirnya dana transfer berupa DAU dan DAK akan digunakan untuk menutupi kebutuhan belanja daerah, di samping penggunaan PAD. Fenomena ini dikenal dengan *flypaper effect*, *flypaper effect* merupakan suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah mengeluarkan belanja lebih banyak dengan menggunakan dana transfer daripada menggunakan kemampuan sendiri yang diprosikan dengan PAD. Hal ini menyebabkan PAD tidak signifikan berpengaruh terhadap belanja daerah, atau pengaruh dana transfer terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap belanja daerah.

Beberapa peneliti sebelumnya telah meneliti pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja daerah. Listiorini (2012), Kusumadewi *et al.* (2007), dan Maimunah (2006) membuktikan terjadinya fenomena *flypaper effect* pada pemerintah kabupaten/kota saat pengaruh dana transfer berupa DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Sebaliknya, penelitian Nahlia (2014), Mentayani *et al.* (2012), serta Darmayasa dan Sedanayasa (2012) tidak menemukan fenomena *flypaper effect* pada penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perolehan PAD yang tinggi mengindikasikan kemandirian dae-

rah dan kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi telah semakin baik.

Selain DAU, dana transfer berupa DAK juga memiliki kontribusi terhadap pengeluaran belanja daerah. Penelitian sebelumnya yang meneliti pengaruh DAK terhadap belanja daerah adalah Nahlia (2014) dan Listiorini (2012). Hasil penelitian Nahlia (2014) menyimpulkan DAK memiliki hubungan yang positif terhadap belanja daerah, namun pengaruhnya tidak signifikan. Sedangkan Listiorini (2012) menyimpulkan adanya hubungan yang berlawanan antara DAK dan belanja daerah, dan pengaruh DAK tersebut tidak signifikan.

Perbedaan hasil penelitian dari para peneliti sebelumnya, memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pengaruh PAD, dan dana transfer berupa DAU dan DAK terhadap belanja daerah, serta apakah telah terjadi fenomena *flypaper effect* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan (2009-2013). Adapun rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaruh PAD terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2009-2013; 2) Bagaimana pengaruh DAU terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2009-2013; 3) Bagaimana pengaruh DAK terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2009-2013; dan 4) Apakah pengaruh DAU dan DAK terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2009-2013.

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) untuk pengeluaran pemerintah daerah, dan juga membuktikan secara empiris apakah efek dari DAU dan DAK ke daerah belanja pemerintah lebih besar dari pengaruh PAD terhadap belanja pemerintah daerah di kabupaten / kota Provinsi Kalimantan Selatan pada periode 2009-2013.

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal**

Otonomi daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 5 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan. Sedangkan yang dimaksud dengan desentralisasi fiskal menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

### **Hubungan Keagenan dalam Pemerintahan Daerah**

Dilihat dari hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal (Halim dan Abdullah 2006). Pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif menyusun anggaran daerah dalam bentuk Rancangan APBD (RAPBD) yang selanjutnya diserahkan kepada DPRD (legislatif) untuk diperiksa. Jika RAPBD telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka DPRD akan mengesahkan RAPBD menjadi APBD. Sedangkan dalam hubungan antara legislatif dan publik, DPRD (legislatif) bertindak sebagai agen dan publik bertindak sebagai prinsipal. Halim dan Abdullah (2006) menyatakan bahwa publik adalah prinsipal yang memilih perwakilannya untuk menjadi agen dalam parlemen. Jadi, walaupun legislatif menjadi pihak prinsipal, di sisi lain dapat bertindak sebagai agen dalam hubungannya dengan publik.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 17 yang dimaksud dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan publik. Tahapan dalam penyusunan APBD antara lain; penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), penyiapan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), penyusunan RKA SKPD, penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD, dan evaluasi Raperda APBD (Nordawan *et al.*, 2012).

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Besar kecilnya pendapatan menentukan kualitas pelaksanaan pemerintahan, tingkat kemampuan pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik, serta keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan (Mahmudi 2010). PAD sebagai salah satu komponen pendapatan memiliki peran penting dalam pengeluaran belanja pemerintah daerah karena untuk mendanai kebutuhan belanja yang tinggi memerlukan sumber pendanaan yang mencukupi.

### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kegiatan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DAU ditetapkan sesuai formulasi yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal, dan potensi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Celah Fiskal}$$

Keterangan:

Alokasi Dasar : Gaji PNS daerah

Celah Fiskal : Kebutuhan Fiskal - Kapasitas Fiskal

Kebutuhan Fiskal (KbF) dan Kapasitas fiskal (KpF) dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$\text{KbF} = \text{TBR} (\alpha \text{IP} + \alpha \text{IW} + \alpha \text{IPM} + \alpha \text{IKK} + \alpha \text{IP-DRB/kap})$$

$$\text{KpF} = \text{PAD} + \text{DBH Pajak} + \text{DBH SDA}$$

Keterangan:

TBR : total belanja rata - rata APBD

IP : indeks jumlah penduduk

IW : indeks luas wilayah

IPM : indeks pembangunan manusia

IKK : indeks kemahalan konstruksi

IPDRB/ : indeks produk domestik regional kap al bruto per kapita

$\alpha$  : bobot indeks

PAD : pendapatan asli daerah

DBH : dana bagi hasil penerimaan pajak

DBH : dana bagi hasil penerimaan SDA sumber daya alam

Menurut Darise (2009) DAU untuk suatu daerah otonom baru dialokasikan setelah UU pembentukan disahkan dan setelah tersedia data. Jika data tidak tersedia, penghitungan DAU dilakukan dengan membagi secara proporsional dengan daerah menggunakan data jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah belanja pegawai. DAU disalurkan dengan cara pemin-

dahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah yang dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari alokasi DAU daerah yang bersangkutan dan dilaksanakan sebelum bulan yang bersangkutan.

### Dana Alokasi Khusus

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, khusus, dan teknis. Menurut Nordiawan *et al.* (2012), penggunaan alokasi DAK per daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan harus dilakukan sesuai Petunjuk Teknis Penggunaan DAK dan tidak digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.

### Belanja Daerah

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga, sedangkan belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri dari belanja pegawai (honorarium atau upah), belanja barang dan jasa, dan belanja modal (Nordiawan *et al.* 2012).

### Flypaper Effect

*Flypaper effect* dalam bidang keuangan publik menunjukkan bahwa hibah pemerintah pusat ke pemerintah daerah meningkatkan pengeluaran masyarakat lo-

kal lebih dari peningkatan pendapatan daerah. Konsep ini pertama kali dijelaskan oleh Arthur Okun (1979). Penelitian Okun menyimpulkan bahwa hibah dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah dengan jumlah yang lebih besar dari peningkatan setara dalam pendapatan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Mentayani *et al* (2012) menyimpulkan *flypaper effect* sebagai suatu kondisi keuangan pemerintah daerah yang membelanjakan lebih banyak dan lebih boros dengan menggunakan dana transfer dibandingkan dengan menggunakan dana sendiri yang bersumber dari PAD. Nahlia (2014) menganggap *flypaper effect* sebagai suatu anomali dalam perilaku rasional jika transfer harus dianggap sebagai tambahan pendapatan masyarakat (seperti halnya pajak daerah), sehingga harus dibelanjakan dengan cara yang sama pula dengan PAD. Fenomena *flypaper effect* membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah**

Sebagai konsekuensi atas diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dapat dengan leluasa untuk menggali dan mengelola PAD nya agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan sehari-hari. Penelitian Nahlia (2014), Darmayasa dan Sedanayasa (2012), Listiorini (2012), Mentayani *et al.* (2010), dan Maimunah menyimpulkan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Melalui PAD yang tinggi, pemerintah dapat menurunkan ketergantungannya terhadap pemerintah daerah. Kondisi ini mencerminkan kemandirian daerah yang baik, karena pemerintah daerah yang memiliki PAD yang tinggi dapat mengalokasikan anggaran belanja dengan lebih leluasa tanpa harus bergantung kepada dana transfer.

H1 : PAD berpengaruh terhadap Belanja

Daerah

### **Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah**

Sebagai salah satu komponen pendapatan daerah, DAU menjadi sumber pendanaan yang penting bagi pemerintah daerah untuk mencukupi kebutuhan belanja. Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arwijaya (2014), Listiorini (2012), Siagian (2009), Kusumadewi *et al.* (2007), dan Maimunah (2006) menyimpulkan adanya hubungan yang searah antara DAU dan belanja daerah, di mana peningkatan DAU juga diikuti oleh kenaikan pengeluaran belanja.

H2 : DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah

### **Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Daerah**

Menurut Kuncoro (2011) salah satu persyaratan untuk menerima DAK adalah daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kebutuhan tersebut dari PAD, bagi hasil pajak dan sumber daya alam, DAU, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Artinya, DAK sebagai salah satu komponen pendapatan daerah juga diperlukan daerah untuk mencukupi kebutuhan pengeluaran belanja, namun untuk kebutuhan yang bersifat lebih spesifik.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nahlia (2014) menyimpulkan DAK berpengaruh terhadap belanja daerah, namun tidak signifikan. Ketika terjadi peningkatan DAK, maka belanja daerah juga meningkat namun tidak signifikan. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan Listiorini (2012) menyimpulkan DAK tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap belanja daerah.

H3 : DAK berpengaruh terhadap Belanja Daerah

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah**

Rencana keuangan pemerintah daerah

disusun dalam APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Penerimaan dari PAD yang diperoleh pemerintah daerah langsung masuk ke APBD, sedangkan penerimaan dana transfer dalam bentuk DAU dan DAK disalurkan dari APBN ke APBD. Ketiga komponen pendapatan tersebut digunakan untuk tujuan pembangunan daerah yang dialokasikan dalam bentuk belanja daerah.

Hukum Wagner menyebutkan adanya korelasi positif antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat pendapatan pemerintah (Adisasmita 2011). Artinya jika pendapatan meningkat, maka dari sisi pengeluaran juga meningkat namun tidak semua peningkatan pendapatan adalah pertanda yang baik jika dilihat dari kemandirian daerah. Penelitian sebelumnya oleh Bailey dan Connolly (1998) menunjukkan adanya peningkatan pendapatan yang diiringi oleh pengeluaran belanja, namun peningkatan pendapatan yang berasal dari dana transfer lebih besar daripada peningkatan pendapatan sendiri. Fenomena inilah yang dikenal dengan istilah *flypaper effect*, di mana pemerintah daerah cenderung menggunakan dana transfer untuk pengeluaran belanja daripada menggunakan PAD yang dimiliki.

Penelitian Ariwijaya (2014), Hastuti (2011), Listiorini (2010), Siagian (2009), Kusumadewi dan Rahman (2007), dan Maimunah (2006) membuktikan pengaruh dana transfer terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H4 : Pengaruh DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah Lebih Besar Daripada Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah (*Flypaper Effect*)

**METODE PENELITIAN**

**Populasi dan Sampel**

Penelitian ini merupakan penelitian populasi atau penelitian sensus karena populasi dalam penelitian ini berukuran kecil. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri

dari 11 Kabupaten dan 2 Kota. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang memasukkan data realisasi APBD di situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Pemerintah Daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan periode 2009 hingga 2013.
- b. Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang melaporkan realisasi PAD, DAU, DAK, dan belanja daerah di situs DJPK Pemerintah Daerah dan BPS Provinsi Kalimantan Selatan periode 2009 hingga 2013.
- c. Jumlah realisasi PAD, DAU, DAK, dan belanja daerah di situs DJPK Pemerintah Daerah dan BPS Provinsi Kalimantan Selatan periode 2009 hingga 2013 tidak minus (negatif) dan tidak 0 (nol).

Berdasarkan kriteria di atas, maka kabupaten/kota yang memenuhi kriteria untuk digunakan sebagai populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan tabel 1 Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang tidak memenuhi kriteria sebanyak 1 (satu) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Tabalong, se-

**Tabel 1.**  
Kriteria Populasi Penelitian

No	Kabupaten/Kota	Kriteria 1	Kriteria 2	Kriteria 3
1	Kabupaten Banjar	✓	✓	✓
2	Kabupaten Barito Kuala	✓	✓	✓
3	Kabupaten HSS	✓	✓	✓
4	Kabupaten HST	✓	✓	✓
5	Kabupaten HSU	✓	✓	✓
6	Kabupaten Kotabaru	✓	✓	✓
7	Kabupaten Tabalong	✓	✓	x
8	Kabupaten Tanah Laut	✓	✓	✓
9	Kabupaten Tapin	✓	✓	✓
10	Kota Banjarbaru	✓	✓	✓
11	Kota Banjarmasin	✓	✓	✓
12	Kabupaten Balangan	✓	✓	✓
13	Kabupaten Tanah Bumbu	✓	✓	✓

**Tabel 2.**  
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional Variabel
1.	PAD (X1)	Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6, PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
2.	DAU (X2)	Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kegiatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3.	DAK (X3)	Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 23, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
4.	Belanja Daerah (Y)	Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

hingga jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 12 (duabelas) kabupaten/kota.

#### Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi APBD kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang diperoleh dari situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah pada [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan.

#### Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini terdiri dari beberapa variabel independen (X) yaitu PAD ( $X_1$ ), DAU ( $X_2$ ) dan DAK ( $X_3$ ) serta satu variabel dependen (Y) yaitu belanja daerah. Definisi operasional variabel penelitian ini disajikan pada tabel 2.

#### Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dengan menggunakan *software SPSS 17.0*. Sebelum data dianalisis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat masalah dalam pengujian tersebut sehingga persamaan regresi layak untuk digunakan.

Penelitian ini menggunakan model regresi berganda untuk melihat pengaruh variabel independen (X) yang terdiri dari PAD, DAU, dan DAK terhadap variabel dependen (Y) belanja daerah dengan persamaan sebagai berikut:

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji statistik pa-

**Tabel 3.**  
Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
PAD	60	10099494744	190970259919	49748111510.93	38272654462.554
DAU	60	177090317000	631124460000	354725761288.58	104155145444.7787
DAK	60	1778830000	99896120000	37968774728.17	17533120592.335
BELANJA-DAERAH	60	383631781921	1253358346000	690083615286.77	193768784261.554
Valid N (listwise)	60				

parameter individual (Uji Statistik t), namun sebelumnya terlebih dahulu dilakukan ana-

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Belanja daerah
- $\alpha$  : Konstanta
- $\beta$  : Koefisien regresi
- $X_1$  : PAD
- $X_2$  : DAU
- $X_3$  : DAK
- E : Tingkat kesalahan pengganggu (*error term*)

alisis koefisien determinasi. Sedangkan pengaruh variabel DAU dan DAK terhadap belanja daerah dapat diketahui melalui uji signifikansi simultan (uji statistik F).

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### Statistik Deskriptif dan Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisita. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan tidak ditemukan masalah yang berarti.

Hasil statistik deskriptif dari pengolahan data yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 3. Berdasarkan tabel 3 dapat diinterpretasikan bahwa Variabel PAD ( $X_1$ ) dari pengamatan sebanyak 60 (enam puluh) memiliki nilai minimum Rp10.099.494.744 dan nilai maksimum Rp190.970.259.919. Nilai rata-rata PAD ( $X_1$ ) adalah Rp49.748.111.510,93 dengan standar deviasi Rp38.272.654.462,554. Variabel DAU ( $X_2$ ) dari pengamatan sebanyak 60 (enam puluh) memiliki nilai minimum Rp177.090.317.000 dan nilai maksimum Rp631.124.460.000. Nilai rata-rata DAU ( $X_2$ ) adalah Rp354.725.761.288,58 dan standar deviasi Rp104.155.145.444,787. Variabel DAK ( $X_3$ ) dari pengamatan sebanyak 60 (enam puluh) memiliki nilai minimum Rp1.778.830.000,00 dan nilai maksimum Rp99.896.120.000,00. Nilai rata-rata DAK ( $X_3$ ) adalah Rp37.968.774.728,17 dengan

standar deviasi Rp 17.533.120.592,335. Variabel belanja daerah (Y) dari pengamatan sebanyak 60 (enam puluh) memiliki nilai minimum Rp383.631.781.921,00 dan nilai maksimum Rp1.253.358.346.000,00. Nilai rata-rata belanja daerah (Y) adalah Rp690.083.615.286,77 dengan standar deviasi Rp193.768.784.261,554.

#### Analisis Regresi

Hasil regresi penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4:

**Tabel 4.**  
Hasil Regresi

Variabel	$\beta$	t	Sig.
Konstanta (a)	7,161	4,046	,000
PAD ( $X_1$ )	-,008	-,191	,849
DAU( $X_2$ )	,843	8,604	,000
DAK ( $X_3$ )	-,087	-3,521	,001

#### Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah

Variabel PAD memiliki nilai t hitung < t tabel dan nilai signifikansi > 0,05 sehingga hipotesis nol ( $H_0$ ) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja daerah diterima, dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja daerah ditolak. Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan tidak sejalan dengan hasil penelitian Nahlia (2014), Darmayasa dan Sedanayasa (2012), Listiorini (2012), Mentayani *et al* (2010), dan Maimunah (2006) yang menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.

Hasil statistik deskriptif pada tabel 3 menunjukkan rentang nilai maksimum dan minimum PAD yang sangat jauh, keadaan ini mencerminkan ketimpangan kemampuan daerah yang cukup besar. Secara teoritis, kenaikan pada PAD pada dasarnya menstimulus kenaikan pengeluaran belanja daerah. Hasil analisis regresi membuktikan sebaliknya, di mana PAD berpengaruh negatif terhadap belanja daerah dan memiliki hubungan yang asimetris.

Kondisi asimetris antara PAD dan



belanja daerah terdapat pada Kabupaten HSU, Kota Banjarbaru, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tanah Bumbu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kenaikan PAD tidak selalu diikuti dengan kenaikan belanja. Di sisi penerimaan PAD mengalami peningkatan, namun di sisi pengeluaran belanja daerah justru menurun. Sebaliknya, di sisi penerimaan PAD mengalami penurunan, namun di sisi pengeluaran belanja daerah mengalami peningkatan. Data penelitian dapat dilihat pada bagian lampiran.

Penyebab turunnya belanja daerah ketika PAD meningkat salah satunya terkait dengan rendahnya tingkat penyerapan anggaran. Pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menyebutkan permasalahan yang dihadapi dalam efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran adalah usulan-usulan anggaran yang belum terakomodasi baik melalui dana APBN maupun APBD sehingga sasaran dan target kinerja tidak tercapai secara optimal, terkendalanya pelaksanaan kegiatan dikarenakan masih terjadi keterlambatan turunnya Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis di beberapa satuan kerja sehingga revisi mengalami keterlambatan dan penyerapan dana tidak maksimal, serta adanya kendala teknis sehubungan dengan musim.

#### **Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah**

Nilai  $t$  hitung variabel DAU ( $X_2$ ) sebesar 8,604 sedangkan nilai  $t$  tabel 2,0003. Artinya, nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel sehingga variabel DAU berpengaruh terhadap variabel dependen belanja daerah. Nilai signifikansi variabel DAU ( $X_2$ ) sebesar  $0,000 < 0,05$  menunjukkan bahwa DAU signifikan terhadap belanja daerah, dengan demikian hipotesis nol ( $H_0$ ) yang menyatakan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap belanja daerah ditolak.

Hasil analisis regresi menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel belanja daerah dan variabel DAU. Ketika terjadi peningkatan penerimaan DAU, maka dari sisi pengeluaran belanja daerah akan meningkat, dan begitu pula se-

baliknya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ariwijaya (2014), Listiorini (2012), Siagian (2009), Kusumadewi dan Rahman (2007), dan Maimunah (2006) yang menyimpulkan bahwa peningkatan alokasi transfer juga diikuti dengan pertumbuhan belanja yang lebih tinggi.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun penerimaan dana transfer berupa DAU pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan, meskipun pada kabupaten/kota tertentu terdapat penurunan DAU seperti; Kabupaten Banjar, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tanah Bumbu walaupun jumlah penurunan tersebut tidak terlalu besar, dan tidak terdapat fluktuasi yang serius dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Penurunan DAU tersebut hanya terjadi selama 1 (satu) tahun dan kembali meningkat pada tahun-tahun setelahnya.

#### **Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah**

Hasil analisis regresi variabel DAK bernilai negatif menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah antara variabel DAK dan belanja daerah. Selain itu, hasil uji statistik  $t$  variabel DAK memiliki nilai  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel, dan nilai signifikansi  $<$  0,05 menunjukkan bahwa DAK signifikan terhadap belanja daerah. Berdasarkan hasil analisis regresi dan uji statistik  $t$  dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol ( $H_0$ ) yang menyatakan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap belanja daerah ditolak, dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh terhadap belanja daerah diterima. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nahlia (2014) dan Listiorini (2012) yang menyimpulkan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap kenaikan belanja daerah.

Data penelitian menunjukkan adanya fluktuasi pada penerimaan DAK dari tahun 2009 hingga 2013. Penurunan penerimaan DAK yang signifikan pada sejumlah kabupaten/kota terjadi pada tahun 2010 dan 2011. Pada kebanyakan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan penurunan DAK terjadi apabila pada tahun yang sama pengeluaran belanja meningkat. Pening-

katan belanja daerah yang besar akan berdampak pada turunnya penerimaan DAK. Hal ini membuktikan hubungan antara DAK dan belanja daerah adalah berlawanan, dan pengaruhnya tersebut signifikan.

Penurunan DAK dapat disebabkan oleh realisasi penyerapan DAK yang tidak mencapai 100%. Artinya, tidak seluruhnya dana yang dicairkan dari kas negara ke kas daerah yang dikelola bendahara umum daerah dimanfaatkan semaksimal mungkin. Alasan lainnya adalah penggunaan PAD dan DAU untuk menutupi kekurangan dana akibat penurunan penerimaan DAK. Misalnya, meskipun terjadi penurunan penerimaan DAK di tahun 2013 pada Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Balangan di sisi penerimaan terjadi peningkatan PAD dan DAU yang dapat dijadikan sumber pendanaan belanja.

#### **Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Daerah**

Berdasarkan uji statistik F, didapatkan nilai F hitung sebesar 95,704 dan nilai signifikansi 0,000. Jika dibandingkan dengan nilai F tabel, nilai F hitung > F tabel ( $95,704 > 3,32$ ) dan nilai signifikansi < 0,05. Artinya, hipotesis nol ( $H_0$ ) yang menyatakan pengaruh DAU dan DAK terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap belanja daerah diterima, dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) ditolak.

Jika dibandingkan dengan nilai koefisien PAD sebesar -0,191 nilai koefisien DAU dan DAK jauh lebih besar. Hasil uji statistik F sesuai dengan kriteria *flypaper effect*, di mana nilai koefisien DAU dan DAK lebih besar dari nilai koefisien PAD, dan keduanya berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Artinya, telah terjadi *flypaper effect* pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2009 hingga 2013. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nahlia (2014), Darmayasa dan Sedanayasa (2012), dan Mentayani *et al* (2012). Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ariwijaya (2014), Listiorini (2012), Siagian (2009), Kusumadewi dan

Rahman (2007), dan Maimunah (2006).

*Flypaper Effect* merupakan dampak negatif dari penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menandakan rendahnya tingkat kemandirian dan kinerja perekonomian daerah. Tinggi rendahnya tingkat kemandirian dan kinerja perekonomian daerah dapat disebabkan oleh beberapa faktor internal seperti potensi fiskal, ketersediaan modal, potensi sumber daya alam dan energi, dan variabel sumber daya manusia (Adisasmita 2011). Faktor-faktor internal tersebut dapat mempengaruhi pengeluaran belanja, di samping variabel lain selain PAD, DAU dan DAK seperti penerimaan pendapatan lain-lain yang sah, dana bagi hasil pajak/bukan pajak, dan pendapatan hibah.

#### **SIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Berdasarkan hasil dan analisis data yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja daerah, DAU berpengaruh terhadap belanja daerah dan DAK berpengaruh terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2009-2013. Secara simultan pengaruh DAU dan DAK lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Hasil penelitian membuktikan secara empiris telah terjadi *flypaper effect* pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2009-2013. Tingkat kemandirian daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan masih rendah karena tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat sangat tinggi dilihat dari nilai signifikansi DAU dan DAK yang lebih tinggi daripada nilai signifikansi PAD terhadap belanja daerah.

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai bahan pengembangan disiplin ilmu akuntansi di bidang akuntansi sektor publik, dan sebagai referensi bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan pelayanan publik. Penelitian mengenai fenomena *flypaper effect* ini juga diharapkan dapat memotivasi peneliti lainnya untuk melakukan

penelitian lebih lanjut terkait dengan topik *flypaper effect* dengan menggunakan variabel lainnya seperti dana bagi hasil, luas wilayah dan jumlah penduduk.

#### KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu populasi yang diambil dalam penelitian ini hanya berjumlah 12 (dua belas) kabupaten/kota dari total 13 (tiga belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga hasil penelitian tidak sepenuhnya merepresentasikan fenomena sesungguhnya dari keseluruhan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Terkait dengan pengumpulan data, kelengkapan data sekunder berupa realisasi APBD pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2009-2013 tidak dapat diperoleh di 1 (satu) sumber saja, sehingga pengumpulan data diperoleh dari 2 (dua) sumber yaitu situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan dengan alasan untuk memenuhi persyaratan kelengkapan data penelitian. Hal lainnya yaitu variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya terdiri dari PAD, DAU, dan DAK sehingga tidak mencakup komponen pendapatan secara keseluruhan. Penelitian ini juga tidak memasukkan faktor lain yang dapat mempengaruhi pengeluaran belanja, misalnya penerimaan pendapatan lain-lain yang sah, dana bagi hasil pajak/bukan pajak, dan pendapatan hibah.

#### DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa*

Ariwijaya, D. 2012. *Timur*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember, Jember.

Bailey, Stephen J, and S. Connoly. 1998. The Flypaper Effect: Identifying Areas for Further Research. *Public Choice* 95 (3/4): 335-361.

Darise, N. 2009. *Pengelolaan Keuangan*

*Daerah*. Edisi Kedua. Jakarta: Indeks.

Darmayasa, I N dan I M Sedanayasa. 2012. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Bali). *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 8 (3): 149-157.

Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi Kelima. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, A. dan S. Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1): 53-64.

Hastuti, I. 2011. Analisis Flypaper Effect Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Skripsi, Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.

Kuncoro, M. 2011. Perencanaan Daerah : Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan?. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.

Kusumadewi, D. A dan A. Rahman. 2007. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 11 (1): 67-80.

Pemda Kalsel. 2013. *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013*.

Listiorini. 2012. Fenomena Flypaper Effect pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten / Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 4(2): 111-126.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

Maimunah, M. 2006. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*. Simposium Nasional Akuntansi XI, Padang, Indonesia.

Mentayani, I, N. Hayati dan Rusmanto. 2012. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada

- Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal SPREAD*, 2(1): 55-64.
- Nahlia, F. 2014. *Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode 2007-2012*. Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH). Diakses 5 Desember 2014, dari <http://jurnal.umrah.ac.id>.
- Nordiawan, D., I. S. Putra dan M. Rahmawati. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Siagian, P. A. 2009. *Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah*.